

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (TINJAUAN HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)**



**JUANDA
NIM: 10624003794**

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup”**, ditulis berdasarkan penelitian perpustakaan, disini kita melihat bahwa pencemaran adalah suatu keadaan, dimana suatu zat atau energi diintroduksi di dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.

Dalam pengumpulan data skripsi ini saya menggunakan metode studi pustaka, studi perpustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku karya ilmiah dan data-data dari internet.

Permasalahan yang ingin dijawab dalam skripsi ini adalah bagaimana sifat dan cara pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup serta beratnya sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku baik orang-perorangan maupun badan hukum menurut Hukum Islam, Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, maupun peraturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup.

Kemudian hal yang sangat diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan yang mendasar baik kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pada aparat penegak hukum sehingga pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat di minta pertanggungjawabannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA	
A. PengertianTindak Pidana.....	10
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
C. Tujuan dan Sanksi Pidanaaan.....	18
D. Pembagian Tindak Pidana	25
E. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam	31
F. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia	35

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH
KORPORASI**

A. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	38
B. Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan Hidup.....	39
C. Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi	41

**BAB IV : ANALISA SANKSI PIDANA KORPORASI DALAM KASUS
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam	43
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Hukum Pidana Indonesia	51
C. Analisis	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
----------------------	----

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan pada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sekarang.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Hamzah bin Sentol dan Ibunda Azizah (Alm) Binti Ja'far yang tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta motivasi dan do'anya, Kakanda Mukhayyar, S.Pdi, Kakanda Khairuddin beserta Istri, Ayunda Erlina, Kakanda Hafizul, Kakanda M.Amrizal, Adinda Zakiah Adinda Sunita, Ncu Zau, Ngah Yusuf, Ncu Imah dan seluruh masyarakat kampung Belokob, yang telah memberi motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H.M Nazir Karim, MA Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Bapak Ismardi, M.Ag, Sekretaris Jurusan Bapak Bambang Hermanto, M.Ag, dan Penasehat Akademik Ibu Dra. Yusliati, MA, yang telah membantu terlaksananya skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi,SH, M.A, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan lebih bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya, khususnya Bpk Drs. Johari, MA, Bpk Haswir, M.Ag, Bpk Drs. Pardi Syamsudin, MA, Bpk Hendri Sayuti, M.Ag, Bpk Drs. H. Mohd, Nasir Cholis,

M.A, Bpk. DR. H. Mawardi M. Saleh, Lc, MA, Bpk. DR. Zulkayandri, MA, Bpk DR. Junaidi Lubis, MA, Bpk H. Marzuki Khatib, MA, Bpk. Helmi Basri, Lc, MA, Bapak dan Ibuk Dosen yang tidak bisa penulis sebut satu demi satu yang telah mendidik dan membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa berwawasan luas, idealis dan agamis.

7. Bapak kepala Perpustakaan al-Jami'ah UIN Suska Riau fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
 8. Untuk seluruh kawan-kawan HMI Komisariat SUPER dan kawan-kawan Kos dan juga kawan-kawan terdekat, Sunardi, Abdul Malik Al-Munir, Ahmad Efendi Siregar, M. Al-latif, Surizal, Herwan, Widodo, Ardianto, Al-Murdini, Ali Mahmuda, Irwanto, Salam, Heldody, Aspar, yang selalu memberikan Motivasi dan dukungan dalam kehidupan penulis.
 9. Untuk Kakanda HMI Bg Dheni Syahputra, Bg Iwe Merdeka, Bg Herman, Bg Davitra, Bg Misbah, Kak Rani, Bg Nurman, Bg Supri, Bg Rahmat, Bg Pahrijal, Bg Zamzami, yang telah banyak membantu penulis dan menyelesaikan perkuliahan.
 10. Yang terakhir untuk teman-teman Jurusan Jinayah Siyasah, Kawan2 HMI, HIPMADESEMBER, IPMKPM, IPMK2M dan KKN angkatan XXXIII Minas Timur Kec Minas. yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
- Semoga Allah SWT meridhai dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis menyadari skripsi ini jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna bermanfaat untuk dimasa mendatang.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 6 Mei 2013

Penulis

JUANDA

NIM : 10624003794

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA	
A. PengertianTindak Pidana.....	11
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
C. Tujuan dan Sanksi Pidana.....	19
D. Pembagian Tindak Pidana	26
E. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam.....	33
F. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia	37
BAB III : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN	
HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI	
A. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	40

B. Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan Hidup.....	41
C. Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi	43
BAB IV : ANALISA SANKSI PIDANA KORPORASI DALAM KASUS	
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	
A. Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Korporasi Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup	45
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam	48
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Hukum Pidana Indonesia	56
D. Analisis	62
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk Tuhan mengambil tempat dan waktu dalam suatu lingkungan alam sekitarnya. Untuk mempertahankan hidupnya, makhluk hidup sangat tergantung kepada alam sekitarnya yang memungkinkan ia bisa hidup.

Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Jadi kehadiran lingkungan hidup itu sebenarnya amat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya. Selama kehidupan manusia, sejak lahir bahkan ketika didalam kandungan pun, factor lingkungan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan secara mutlak dari manusia. Karena itu, seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan, dalam kelangsungan hidup kita, benda-benda lingkungan itu sangat penting artinya.¹

¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), Cet. Ke-2, h. 2

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak.

Lingkungan dapat dikatakan tercemar jika dimasuki atau kemasukan bahan pencemar yang dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada didalamnya. Gangguan itu ada yang segera nampak akibatnya dan adapula yang baru dapat dirasakan oleh keturunan berikutnya.²

Masalah-masalah lingkungan terjadi di mana-mana, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Sehingga masalah lingkungan hidup menjadi masalah yang bersifat nasional, regional/internasional dan bahkan menjadi masalah yang bersifat global. Aktivitas manusia yang menimbulkan akibat berupa pencemaran atau rusaknya lingkungan hidup, dari waktu ke waktu meningkat secara tajam dalam kuantitas maupun dalam kualitasnya dan demikian pula dalam identitasnya. Sehingga masalah tersebut telah menjadi ancaman yang

² Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosia: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet 3, h. 140

mengerikan bagi kehidupan manusia, flora dan fauna beserta ekosistemnya.

Berbagai musibah telah melanda kehidupan masyarakat, meningkatnya kasus demam berdarah, beberapa daerah mengalami banjir dan tanah longsor, harimau dan gajah memporakporandakan pemukiman penduduk dan menelan korban jiwa serta harta benda, semakin luasnya tanah kritis, munurunnya populasi sumber daya alam hayati. Semua peristiwa itu, memberikan peringatan kepada kita semua bahwa perusakan dan pencemaran beserta akibat-akibatnya secara eskalatif telah meningkat tajam.

Berbeda dengan beberapa negara misalnya Belanda, Kanada, Jerman, dan Amerika Serikat memandang masalah lingkungan sebagai masalah yang sangat serius sehingga penciptaan undang-undang lingkungan dan penegakannya dipandang sangat mendesak.³

Suatu kejahatan tidak akan begitu saja terjadi, apabila tidak ada penyebabnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai akal, pikiran dan perasaan tidak akan melakukan perbuatan jahat, apabila tidak ada pengaruh dari faktor-faktor tertentu yang membuat ia melakukan demikian. W. A. Bonger menyebutkan kejahatan sebagai : "Perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)."⁴

³ Moelyadi Dwijodarmo, *Istilah-istilah Hukum Dalam Bahasa Belanda*. (Jakarta: PT. Karya Nusantara, 1983), Cet Ke-3, h. 9

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 57

Pencemaran lingkungan hidup ini dalam praktiknya tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja, akan tetapi sudah merambah kepada praktek "kongkalikong" dan konspirasi untuk melakukan suatu tindakan yang hanya menguntungkan kelompok sendiri akan tetapi mengakibatkan pencemaran lingkungan sebagai dampak dari tindak pidana korporasi yang dilakukan. Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan bahkan secara terang-terangan dipertontonkan kepada rakyat oleh kalangan elit yang dalam hal ini, pengusaha, oknum pemerintah, cukong-cukong, seolah-olah negeri ini adalah monopoli milik mereka. Patut diakui, dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup, Indonesia agak terlambat dalam merespon hal tersebut.

Kejahatan korporasi juga dikenal sebagai kejahatan kerah putih, di mana para pelaku bisa dengan mudah melakukan kejahatan tindak pidana secara bersama-sama dengan terorganisir dalam suatu badan usaha atau perusahaan.⁵

Dalam Hukum Islam tindakan-tindakan pelanggaran ini disebut sebagai jarimah. Di mana suatu perbuatan yang merugikan orang lain maka akan dikenai sanksi baik dalam berbentuk hudud maupun takzir. Dalam Hukum Islam tidak dikenal kejahatan korporasi, tetapi yang lebih dikenal adalah kejahatan yang dilakukan bersama-sama, yang disebut dengan *al-Isytirak fi al-Jarimah*.

Hukum Islam tidak mengajarkan manusia mencari nafkah dengan cara yang bathil, yaitu dengan cara melakukan korupsi, penipuan,

⁵ W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1997), Cet. Ke-4, h. 23

penggelapan uang atau pencucian uang yang biasanya kejahatan tersebut rentan terjadi dalam sebuah korporasi.

Pada tindak pidana korporasi, korporasi tidak mungkin memiliki niat atau kehendak, karena korporasi adalah subjek hukum fiktif yang merupakan sekelompok orang yang melakukan usaha bersama-sama, korporasi tidak punya kehendak bebas, kehendak korporasi pada hakekatnya adalah kehendak pengurus korporasi yang nota bene adalah sekumpulan orang.

Bila dengan peringatan-peringatan itu, kita masih juga belum terpanggil untuk menegakkan hukum lingkungan, maka suatu saat nanti kita akan dihadapkan pada masalah pencemaran dan perusakan yang sangat serius dan merupakan ancaman dahsyat bagi kehidupan. Tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan di negara-negara maju disadari dan dirasakan setelah keadaan terlanjur menjadi parah, sehingga upaya penanggulangannya menjadi suatu usaha yang besar dan mahal.⁶

Oleh karena itu, dengan melihat latar belakang tersebut, penulis merasa tergerak untuk mengkaji permasalahan ini dan menulisnya dalam skripsi dengan judul:

”Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”

B. Batasan Masalah

⁶ Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), Cet. Ke-6, h. 6

Melihat begitu kompleksnya hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, maka penulis menganggap perlu memberi batasan dan perumusan masalah. Untuk itu penulis membatasi permasalahan pada Pertanggung Jawaban dalam kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi, ditinjau dari aspek hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, makanya penulis mencoba merumuskan suatu perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Islam Memandang pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi itu terjadi.
2. Untuk mengetahui jenis sanksi yang patut diberikan pada pelaku pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup menurut hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

B. Kegunaan Penelitian

1. Dapat mengetahui permasalahan korporasi baik dari segi pelanggaran dan juga sanksi yang patut dibebankan pada pelaku pidana korporasi pada kasus lingkungan hidup.

2. Dapat mengetahui sanksi yang patut dibebankan kepada pelaku pidana korporasi melalui hukum Islam dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
3. Bagi penulis, untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan salah satu syarat dan kewajiban bagi setiap mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
4. Menyumbangkan pemikiran berupa gagasan sebagai hasil kegiatan penelitian yang berdasarkan prosedur, ilmiah, serta melatih kepekaan penulisan sebagai mahasiswa terhadap masalah-masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis selanjutnya data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tema-tema dan hal-hal yang akan dibahas, penulis menguraikan data-data tersebut dengan memaparkan secara sistematis dilengkapi dengan analisis, kritik, kesimpulan dan saran.

2. Sumber Data

1. Bahan hukum primer : sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan utama pada penulisan skripsi ini. Berupa Al-Qur'an, Hadist, Kitab-kitab Fiqih , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan, Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Bahan hukum sekunder : sumber-sumber yang digunakan sebagai penjelasan atau pendukung dari bahan primer dan dapat membantu, menganalisa dan memahami bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier : sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan sekunder dan primer untuk memberikan deskripsi yang lebih rinci terhadap kajian yang menjadi objek penelitian yang meliputi bibliografi, kamus dan ensiklopedi dan lain sebagainya

3. Metode Pengumpulan Data

Karena bertitik tolak pada penelitian yang bersifat literatur, maka sumber data dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada riset kepustakaan (*library research*). Yaitu pengumpulan data-data diperoleh dengan merujuk pada karya-karya yang mendukung (komplementer) yang memiliki relevansi dengan pembahasan skripsi ini.

Setelah diperoleh data dari berbagai sumber (primer dan sekunder) yang berkaitan dengan objek penelitian, maka selanjutnya adalah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh tersebut.

Adapun tehnik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas

Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau⁷.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi pembahasan kedalam lima bab, di mana masing-masing bab mempunyai penekanan atau spesifikasi pembahasan mengenai topik-topik tertentu, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yaitu uraian secara global dan menyeluruh tentang materi yang akan dibahas, terdiri dari : pendahuluan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan pembahasan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tujuan dan sanksi pemidanaan, pembagian tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

Bab III : Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian pencemaran lingkungan hidup serta bentuk-bentuk pencemaran lingkungan hidup, kemudian pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Bab IV : Bab ini membahas pertanggung jawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup menurut Hukum

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), Cet. Ke-2, h. 114

Islam, pertanggung jawaban tindak pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup menurut hukum pidana Indonesia .

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran disertai daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap penting

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum pidana Islam pengertian perbuatan tindak pidana dapat berarti jinayat atau jarimah. Kata jinayat menurut bahasa adalah :

“nama bagi setiap sesuatu yang harus di jauhi oleh setiap orang dari segala bentuk kejahatan dan usaha yang mengarah pada kejahatan”.

Maksudnya adalah melakukan perbuatan dosa.

Sedangkan tindak pidana menurut istilah, tindak pidana sering diistilahkan dengan “*jarimah*” yang berarti :

“Larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta’zir”¹.

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata *syara’* pada pengertian tersebut di atas yang dimaksud adalah suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh *syara’*. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali jika diancamkan hukuman terhadapnya.

¹H.M. Nasir Cholis, *fiqih jinayah*, pekanbaru desember 2000, h.2

Para fuqaha sering memakai kata jinayah untuk jarimah. Semula pengertian jinayah adalah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan hal lain sebagainya. Ada pula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata jarimah pada jarimah hudud dan kisas saja. Sedangkan menurut As-Sayyid pengertian jinayat adalah :

“Yang dimaksud jinayat menurut syara' ialah setiap perbuatan yang diharamkan yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang dan dilarang syara' serta harus dihindari secara nyata karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa istilah jinayat dalam istilah fuqaha sama dengan kata-kata “*jarimah*”.

Demikian halnya dengan Prof. KH. Ibrahim Hosen yang mendefinisikan jarimah atau jinayah sebagai balasan berbentuk ancaman yang sejenisnya ditetapkan oleh syara' untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya demi terwujudnya kemaslahatan.

Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian jarimah ialah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan hukuman had atau hukuman takzir. Larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilanggar atau meninggalkan yang diperintah.²

2. Menurut Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda “*straf bare feit*”, sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam “*straf wet boek*” atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang di Indonesia.³ Adapun dalam bahasa asingnya “*delict*”, yang secara etimologis diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum peristiwa pidana atau tindak pidana. Adapun secara terminologis yaitu suatu peristiwa pidana. Dalam keterangan yang lain, dengan pengertian yang lebih luas tentang tindak pidana, adalah untuk menyatakan konkrit sebagaimana halnya peristiwa-peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku dan gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Sedangkan yang dimaksud peristiwa adalah suatu kejadian atau hal yang benar-benar terjadi.

Adapun mengenai *straf baar feit* ini para sarjana hukum telah merumuskan suatu teori yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Disamping kata tindak pidana para ahli juga memiliki terjemahan masing-masing, diantaranya :

² H.M. Nasir Cholis, *fiqih jinayah*, pekanbaru desember 2000, h.2

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008, h

- a. Moelyanto, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab atau disebut dengan istilah perbuatan pidana⁴.
- b. *Mr. Utrecht* berpendapat, bahwa *strafbare feit* ini lebih didekatkan pada istilah “peristiwa pidana”. Karena peristiwa itu meliputi perbuatan (*Handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*Verzuim* atau *Nalalen* atau *Niet-Doen*, negatif) maupun akibatnya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *strafbare feit* (tindak pidana) menurut hukum positif adalah perbuatan, gerak-gerik, tingkah laku atau sikap jasmani seseorang yang bertentangan dengan hukum atau mengadakan suatu pelanggaran terhadap penguasa yang diancam dengan hukuman, yang dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Di mana pelaksanaannya dilakukan oleh suatu instansi yang diberi wewenang untuk menjalankannya.

Dari uraian tentang tindak pidana dari para ahli hukum bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang di mana pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

⁴Moeljanto, *azas-azas hukum pidana*, jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, h.56

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Menurut Hukum Islam

Untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana maka harus terdapat unsur-unsur yang terdiri atas tiga macam :

- 1) Adanya *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, unsur ini disebut rukun *syar'i* atau disebut "unsur formal".
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau pun sikap tidak melakukan perbuatan dan disebut rukun *m ddi* atau "unsur materiil".
- 3) Pelaku adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan ini disebut rukun *adabi* atau "unsur moril".

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan pada jarimah. Di samping unsur umum dari tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Seperti unsur "pengambilan secara diam-diam". Bagi jarimah pencurian⁵.

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah apabila unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah. Maka unsur-unsur khusus

⁵ Ahmad Hanafi, asas-asas hukum pidana islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, h.6

dapat berbeda bilangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.

Dalam hal ini hukum pidana Islam mempunyai beberapa kaidah pokok yang menyatakan bahwa, tidaklah dianggap suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada *nash* yang jelas. Oleh karena itu tidak dikenakan hukuman kecuali ada dasar yang menyatakannya, hal ini sesuai dengan kaidah :

“sanksi hukum tidak akan dapat diterapkan sebelum ada pernyataan dari nash”⁶.

Selain kaidah di atas ada pula kaidah lain yaitu :

“Agama tidak membebani kecuali orang yang mampu atau kuasa untuk memahami dalil dapat menerima terhadap apa yang ditaklifkan kepadanya. Dan tidak pula agama itu membebani seseorang kecuali dengan beban seseorang dengan beban yang mungkin dilakukan serta diketahui. Sehingga orang tersebut dapat mentaatinya”.

Dari kaidah di atas mengandung pengertian keharusan untuk memenuhi syarat-syarat bagi seorang mukalaf agar dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Di antara syarat-syarat tersebut antara lain adalah :

⁶ H.M.Nasir Cholis, *fiqih jinayah*, Pekanbaru desember, 2000, h.8

- 1) Hendaknya orang tersebut mampu memahami dalil taklif, harus mampu memahami *Nash* syariatnya yang menunjukkan hukum. Karena orang yang tidak memahami hukum tidaklah dapat mentaati apa yang dibebankan kepadanya.
- 2) Hendaklah orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi atasnya.

Kemudian ditambah lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap perbuatannya yang diperintahkan, yaitu sebagai berikut :

- a) Harus mungkin, tidak ada taklif yang tidak ada kemungkinan untuk dilaksanakan.
- b) Ada kemungkinan bagi orang tersebut untuk melaksanakan perbuatan atau tidak melaksanakannya.
- c) Hendaknya perbuatan itu setelah adanya kemungkinan orang tersebut dengan pengetahuannya yang sempurna hingga orang tersebut dapat mentaati taklif (yang disebabkan) kepadanya.

Dari uraian kaidah di atas dapat diketahui bahwa kaidah di atas mempunyai persamaan dengan asas legalitas dalam hukum pidana konvensional

2. Menurut Hukum Pidana Indonesia

Untuk menentukan perbuatan seseorang. Apakah termasuk tindak pidana atau tidak. Untuk tiap undang-undang merumuskan

bahwa tiap-tiap tindak pidana terdapat unsur-unsurnya, yaitu unsur subyektif dan objektif.

Yang dimaksud unsur subyektif adalah unsur yang terdapat pada diri si pelaku tindak pidana yang terdiri dari hal yang dapat dipertanggungjawabkan (*teorkening vastbaar heid*) dan kesalahan. Apakah seseorang dapat dipersalahkan sehingga akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini yang perlu dipertegas adalah masalah kesalahan (*schuld*) dan masalah pertanggung jawabannya. Dalam unsur subyektif pendapat Satochid Kartanegara dapat diartikan dalam beberapa arti yaitu :

1. *Schuld* dalam arti, *social ethis* adalah suatu hubungan jiwa seseorang yaitu, yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya hubungan jiwa itu sedemikian rupa, sehingga perbuatannya atau akibatnya berdasarkan pada jiwa si pelaku tersebut dan dapat dipersalahkan kepadanya. Maksudnya adalah keadaan si pelaku tersebut dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya. Karena jika si pelaku itu gila maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. *Schuld* dipandang dari sudut hukum pidana yaitu kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (*opzet*) dan kesalahan (*culpa*).

Dari penjelasan di atas maka jelaslah bahwa unsur subyektif dari norma pidana adanya suatu kesalahan atas pelaku dan yang dapat dipertanggungjawabkan itulah yang dapat disalahkan⁷.

Adapun unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu yang berupa :

1. Tindak-tanduk (tindakan) yaitu tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya: mengambil (*wagnemen*) Pasal 362 tentang pencurian.
2. Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan hukum. Contohnya : Pasal 338 tentang pembunuhan. Di mana dalam unsur objektif ini adalah akibat (*gevolg*) yaitu matinya orang lain.
3. Keadaan atau hal-hal yang khusus yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Contohnya: Pasal 281 tentang melanggar kesusilaan umum. Dalam perbuatan ini yang dapat di hukum apabila dilakukan di depan umum.

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah bentuk dari perwujudan perbuatan si pelaku akibat dari perbuatannya.

C. Tujuan Pidanaan

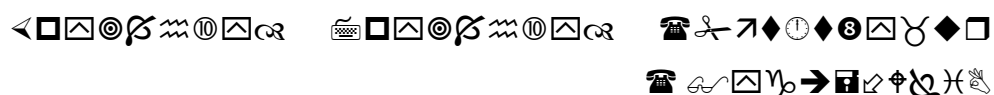
1. Menurut Hukum Islam

Setelah kita mengetahui tentang pengertian, dan unsur-unsur tindak pidana, hal lain pentingnya adalah mengetahui tujuan apa yang hendak dicapai dari sebuah penghukuman (pidanaan).

⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Pusaka Setia, 2000), h.

Karena hukuman untuk pencegahan maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang ditentukan dan demikian dalam menjatuhkan hukuman harus memperhatikan prinsip keadilan besarnya hukuman harus setimpal dengan besarnya jarimah yang dilakukan. Hal ini senada dengan firman Allah yang

berbunyi : Q.S. (42) : 40



⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h

“Dan balasan terhadap suatu kejahatan adalah kejahatan serupa”⁹.

Dari kedua tujuan pemidanaan tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan pemidanaan dalam pidana Islam:

- a. Memelihara masyarakat, yakni sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatan kejahatan yang dilakukan, walaupun pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan karena jika tidak demikian, masyarakat akan terancam oleh perbuatan perseorangan tersebut. Sebagaimana kaidah Fiqh yang berbunyi:

“Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus”.

Sebagai upaya atau prevensi khusus bagi pelaku. Diharapkan dengan hukuman, maka orang tidak akan melakukan kejahatan, karena telah mengetahui akibat yang akan ditanggung apabila melakukan kejahatan.

- b. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*) karena setelah diharapkan setelah mendapat hukuman pelaku kejahatan akan berubah menjadi orang yang baik.
- c. Sebagai balasan atas perbuatan sebagaimana menurut Abdul Qodir Al Audah dalam kitabnya *Al-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami* yang mengatakan “Menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan dibalas dengan kebaikan, perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan pula”.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, PT: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Sebagaimana dalam Al Qur'an yang telah diterangkan dalam Asy-Syura ayat 40¹⁰.

2. Menurut Hukum Pidana Indonesia

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif juga bermacam-macam tergantung teori mana yang kita gunakan. Pada hukum pidana positif pada dasarnya seorang yang melakukan suatu perbuatan jahat atau tercela yang dikategorikan sebagai kejahatan dan dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenakan suatu akibat hukum berupa pidana.

Masalah pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana positif menjadi salah satu topik yang menonjol dalam pertentangan dua aliran dalam hukum pidana. Apabila aliran klasik menitik beratkan kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki individualisasi dari pidana.

Di antara para ahli hukum pidana positif terdapat berbagai macam pendapat tentang tujuan dijatuhkannya suatu hukuman. Menurut S.R. Sianturi yang menyertakan tentang alasan dan maksud pemidanaan yang dibedakan atas tiga golongan yaitu teori pembalasan (teori *absolute*), teori tujuan (teori *relative*), dan teori gabungan (*vereeniging theorieen*), sebagai berikut:

¹⁰ Abdul Qadir Al-Audah, *Al-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami*, (Beirut, Daar Al-Fikr.t.th), h. 75

a. Teori Pembalasan (teori *absolute*)

Membenarkan pemidanaan seorang telah melakukan suatu tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pada pidana tanpa mempersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Di sini dikenal pernyataan mata ganti mata, gigi ganti gigi, teori ini terbagi atas lima bagian yaitu:

- 1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (*moraalphilosofie*) oleh Immanuel Kant. Mereka berpendapat walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus menjalani pidananya.¹¹
- 2) Pembalasan bersambut (*dielectische Vergelding*) yaitu teorinya legal yang menyatakan bahwa untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan cara memberikan “ketidakadilan” kepada penjahat.
- 3) Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*easthetische vergelding*) oleh Herbart, yang menyatakan bahwa dengan memidana penjahat, ketidakpuasan masyarakat atau rasa keindahan masyarakat dipulihkan kembali.¹²
- 4) Pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan yang dikemukakan oleh Stanl, Gewin, dan Thomas Aquino kejahatan merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan tuhan, sehingga mempertahankan

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h 159

¹² Ibid, h 160

prikeadilan tersebut adalah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa negara.

- 5) Pembalasan sebagai kehendak manusia dikemukakan oleh para penganut madzhab hukum alam yang memandang hukum negara sebagai hasil kehendak manusia. Mereka berpendapat bahwa merupakan tuntutan alam, siapapun yang melakukan kejahatan akan menerima sesuatu yang jahat pula. Para tokohnya antara lain JJ. Roseou, Huge de Groot, dan Beccarica.

b. Teori Tujuan (teori *relative*)

Yang menyatakan bahwa diancamkan dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat ataupun pelaku kejahatan untuk memperbaiki penjahat, menjamin ketertiban hukum atau prevensi hukum. Teori relatif ini merupakan kebalikan dari teori *absolute*, karena teori *relative* adalah merupakan teori yang mencari pembenaran terhadap hukuman yang dijatuhkannya hukuman tindak pidana (*delict*) itu sendiri yaitu dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan bukan disebabkan karena orang berbuat jahat (*Dura Peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*Ne Pacetur*). Dalam teori ini juga hukuman ditujukan untuk mengupayakan perbaikan bagi penjahat atau pelaku. Dan bertujuan untuk mendidik pelaku agar menjadi orang terbaik dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Wiryono bahwa teori relatif adalah, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, melainkan

harus dipersoalkan juga manfaat pidana bagi masyarakat atau penjahat itu sendiri. Dan juga kejahatan yang dilakukan tidak terulang lagi (*prevensi*).

Prevensi ini ada dua macam yaitu prevensi khusus (*special*) dan prevensi umum (*general*) yang keduanya didasarkan pada gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut melakukan kejahatan. Dalam prevensi khusus (*special*) ini membuat takut pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan prevensi umum (*general*)nya adalah mengusahakan masyarakat lainnya takut untuk berbuat kejahatan.¹³

c. Teori Gabungan (*vereeniging theorieen*)

Teori gabungan ini merupakan penghubung dua teori yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori ini lahir karena ketidakpuasan terhadap tujuan pemidanaan dari dua teori di atas. Teori ini mencoba memadukan pokok pikiran dan tujuan dari teori absolut dan relatif. Dalam teori gabungan ini menekankan bahwa hukuman yang diberikan pada pelaku perbuatan jahatnya dan sekaligus bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jahatnya.¹⁴

Adapun jenis sanksi pidana yang dijatuhkan, utamanya mengacu dalam KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar

¹³ Ibid, h 162

¹⁴ Ibid, h 166

yang termaktub dalam KUHP. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidananya yang termaktub dalam Pasal 10 diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok ada empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.
- 2) Pidana tambahan meliputi pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Adapun hak-hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi, pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi maka bebas dalam menentukan lama pencabutan tersebut.¹⁵

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Menurut Hukum Islam

Dalam syariat Islam umumnya para ulama atau para ahli hukum Islam membagi tindak pidana menjadi tiga bagian yaitu: hudud, qishash/diyat, dan takzir.

a. Hudud

Kata “*hudud*” secara etemologi bentuk jamak dari kata “*hadd*” yang artinya membatasi, sedangkan secara istilah, hudud yaitu suatu peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-

¹⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h 16

hal yang boleh dan dilarang (haram). Menurut Abdul Qadir Al Audah, *had* adalah hukuman yang kadarnya ditentukan oleh Allah. Jadi *hudud* adalah hukuman kejahatan yang telah ditentukan kadarnya sebagai hak Allah, baik kuantitas maupun kualitasnya telah ditentukan dan tidak mengenal tingkat kejahatan yang dihukum dengan hukuman *hadd* adalah zina, tuduhan palsu zina, khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.¹⁶

b. Qishash

Jenis hukuman pidana qishash telah ditentukan, sama halnya dengan pidana hudud, hanya saja qishash menjadi hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pelaku oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi dalam qishash korban atau ahli warisnya dapat memaafkan pelaku dengan meniadakan qishash dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan diyat atau meniadakan diyat sama sekali. Contoh dari hukuman qishash adalah pembunuhan sengaja (*qatl amdi*), pelukaan sengaja (*jarn amdi*), dan menghilangkan anggota tubuh dengan sengaja.

c. Diyat

Diyat adalah ganti rugi merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (*qishash*) yang apabila pelakunya di

¹⁶ Ahmad Hanafi, *asas-asas hukum pidana islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, h.7

maafkan atau adanya suatu sebab *syari'i* yang menghalangi atau mencegah adanya qishash. Oleh karena itu diyat dan qishash mempunyai hubungan yang sangat erat, contoh dari hukuman diyat adalah pembunuhan semi sengaja (*qatl sibhul amdi*), pembunuhan tidak sengaja, pelukaan tidak sengaja, dan menghilangkan anggota badan yang tidak disengaja.¹⁷

d. Takzir

Dari segi bahasa takzir merupakan kata benda yang mempunyai sifat ahdad (besar) dan menunjukan sifat-sifat agung yang berkaitan dengan pengertian pelajaran (*ta'bid*). Begitu juga pendapat Abdul Qadir Al Audah bahwa ta'zir diartikan dengan pengertian pelajaran oleh karena itu, dalam hukum secara teknis istilah takzir ini dipergunakan untuk menyebut tindakan yang bersifat pelajaran atau pengajaran yang diberikan terhadap orang yang melakukan kesalahan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum had¹⁸.

Takzir merupakan hukuman yang tidak ditentukan batasannya sebagaimana hukuman had, qishash, diyat, dan yang menentukan hukuman adalah hakim. Dalam jarimah takzir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

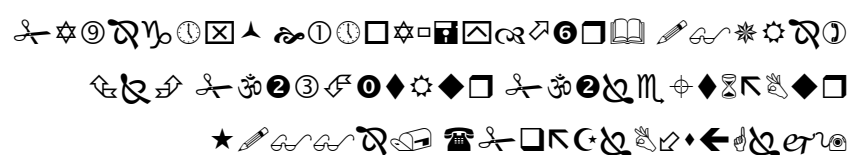
¹⁷ Ibid, h 8

¹⁸ Ahmad Hanafi, asas-asas hukum pidana islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, h.8

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk pidana takzir ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan pembedaan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, khususnya terhadap bentuk-bentuk tindak pidana yang tidak atau belum diatur dalam kedua sumber hukum itu. Tetapi kenyataannya memerlukan pengaturan tertentu yang bersifat pidana. Hal ini dimungkinkan karena ketentuan-ketentuan pidana yang secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan contoh-contoh dari Nabi. Memang masih terbatas kepada kenyataan empiris di zaman Nabi.

Sedangkan kebutuhan masyarakat semakin hari semakin kompleks dan berkembang. Karena bentuk-bentuk atau jenis-jenis kejahatan semakin menjadi kompleks. Oleh karena itu, adanya pidana takzir ini sebagai produk ijtihad para hakim dan ahli hukum, sangat menarik untuk dikaji sebagai sesuatu yang merefleksikan kenyataan bahwa pemikiran mengenai hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu mempunyai peluang untuk dikembangkan atau dijabarkan secara lebih luas.

Dalam mengembangkan pemikiran mengenai pidana takzir ini, umumnya para ahli hukum menghubungkan istilah takzir ini dengan perkataan *thu'azziru* dalam *Al-Fath* ayat 8-10:





“Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar”¹⁹. (QS Al-Fath 8-10)

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, PT: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

2. Menurut Hukum Pidana Indonesia

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dibedakan menjadi dua bagian yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang ditempatkan di dalam buku II dan pelanggaran (*over terdingen*) yang ditempatkan dalam buku III.²⁰

Dalam KUHP, tidak ada pasal yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun bab-bab dari buku ke-1 (aturan umum) selalu ditemukan penggunaan istilah-istilah tindak pidana (*staafbaarefeit*), kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*over terdingen*). Ketiga ciri-ciri itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*strees*) pada delik hukum (*recht delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*). Kejahatan adalah tindak pidana yang telah berlaku secara normatif. Sehingga setiap orang mengakui bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana yang baru bisa diberikan hukumannya bila ada aturan tertulis.

Namun adapula yang berpendapat bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada berat ringannya suatu tindak pidana. Tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), serta tindak pidana pelanggaran seperti kenakalan (Pasal 489 KUHP). Hal tersebut secara spesifikasi dapat dilihat dari aturan pidana yang terdapat dalam KUHP sebagai berikut:

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h 121

- a. Pidana penjara hanya akan diancamkan kepada kejahatan apa saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan dalam bentuk kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan harus dibuktikan oleh jaksa sebaiknya dalam pelanggaran tidak mesti.
- c. Percobaan dan membantu melakukan pelanggaran tidak dapat di pidana Pasal 54 dan Pasal 60.
- d. Tenggang dasawarsa dalam menjalankan pidana pelanggaran lebih pendek dari kejahatan.
- e. Dalam hal pelanggaran (*coscursus*), maka pembedaan kumulasi lebih mudah dari pada pidana berat.

Pipin Syarifin mengutamakan bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi dapat dirasakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya Wet yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan.²¹

Suatu perbuatan merupakan delik hukum, jika perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup di kalangan masyarakat. Terlepas dari hal itu telah dicantumkan dalam undang-undang pidana. Secara normatif, orang buta hukum berpendapat bahwa membunuh, mencuri, memperkosa, merampok dan sebagainya merupakan perbuatan yang dilarang.

²¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Pusaka Setia, 2000)

Sedangkan delik undang-undang (pelanggaran) adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil. Seperti pelanggaran lalu lintas, mabuk di muka umum. Tak mudah dimengerti atau dirasakan bahwa perbuatan itu dilarang. Bahwa mabuk merupakan perbuatan yang dapat di pidana, tidak sembarangan orang dapat merasakan atau mengetahui terlebih lagi orang pelosok pedalaman yang tidak pernah membaca undang-undang. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan tersebut dapat di pidana hanyalah berdasarkan karena telah ditetapkan di dalam undang-undang. Bukan karena berdasarkan atas asas hukum yang memandang perbuatan jahat yang harus dilarang.

E. Pertanggungjawaban Pidana

1. Menurut Hukum Islam

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syariat Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbutatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam ditegakkan atas 3 (tiga) dasar yaitu .

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang yakni melakukan perbuatan benar-benar dilarang oleh Nash, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada kejahatan dan pertanggungjawaban pidana jika tidak ada larangan Nash baik Al Qur'an maupun Hadits.

Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

“Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya Nash”.

- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri yaitu perbuatan itu benar-benar dilakukan atas kehendak sendiri bukan suruhan ataupun dipaksa.
- c. Pelaku mengetahui terhadap perbuatan tersebut bahwa pelaku benar-benar mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dan siap menanggung segala akibatnya. Berdasarkan ketentuan di atas yang dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam hanya mereka yang menerima taklif membenaran saja. Mereka itulah yang disebut dalam kriminologi fiqh sebagai mukalaf.²²

Apabila terdapat ketiga hal tersebut di atas maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri. Kalau salah satu dari ketiga unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi, maka tidak ada pertanggungjawaban atasnya. Karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang mempunyai pilihan.

²² Hanafi Ahmad, *asas-asas hukum pidana islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang 1967, hal 154.

Pada dasarnya pertanggungjawaban dalam syariat Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan perbuatan yang diharamkan oleh *syara'* serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan, firman Allah di dalam surat Al-Azhab ayat 5 yang berbunyi :

◆◻→♂ 𐌹𐌸𐌹𐌺𐌽 *✎🌀◆🔒☹️◻ 𐌹𐌸→♂◻𐌹𐌺𐌽⑩🌀✂️
𐌹𐌸♂👤 𐌹𐌸◻✉️◻◻ 📖★✎🌀✂️ ◻⑨🌀𐌹𐌺𐌽 𐌹𐌸🌀○📖◻📖
𐌹𐌸→♂◆𐌹✎🌀◆🔒✂️◆𐌹📞✂️◻◻←☺️◻📖𐌹→•✂️
✂️×𐌹🌀𐌹🌀✎🌀✂️ ⑦𐌹× 𐌹𐌸→⌚←⚙️🕒◆◻𐌹𐌺𐌽✉️◻◻
𐌹𐌸→⌚📖⑩◻📖𐌹 “•📖⑩•👤◆◻ 📖 𐌹𐌸𐌹📖⑩🌀👤🕒◆◻◆👤◆◻
🕒🌀○𐌹🔒 𐌹→✂️📖•📖𐌹📖◻📖 ✎🌀 ◻☺️⑩🌀◻ 𐌹◻🌀◆🌀𐌹
📖 𐌹𐌸𐌹📖←🔒◻→📖→🔒 ⬆️𐌹◻⑨○☺️◻→•✂️🌀◻👤 Ⅱ📖🕒•👤◆◻
🌀𐌹✂️🌀🕒☺️⑩🌀○•🌀 ✂️☆🌀◻→📖◻📖✂️ +✎🌀✂️ ◆𐌹🔒•📖◆◻

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada

sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Ahzab 33:5)²³

Namun demikian syariat mengecualikan hal tersebut jika terjadi dalam tindak pidana qishash. Maka dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun ada unsur kelalaian atau kealpaan. Hal ini hanya untuk pelaku jarimah qishash.

Apabila seseorang mewakilkan kejahatan dan memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkannya maka ia mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara pembenaran pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan untuk memelihara sebagai alat menegakkan kepentingan

masyarakat. Hukuman yang merupakan beban tanggung jawab pidana harus dibebankan kepada pelaku jarimah atau kejahatan untuk terciptanya tujuan tadi. Untuk itu harus ada

kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat, oleh karena itu hukuman harus.

1. Memaksa seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.

²³ Al-Qur'an dan Terjemah, PT: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

2. Menghalangi keinginan orang lain untuk melakukan hal yang serupa karena bayangan yang ditimbulkan atas hasil perbuatannya akan diterimanya sebagai suatu yang sangat merugikan dirinya.
3. Sanksi yang diterima pembuat jarimah harus pula bersesuaian dengan hasil perbuatannya, artinya berkeadilan.
4. Sanksi hendaknya merata tanpa pertimbangan yang menunjukkan derajat manusia, kaya miskin, pejabat dan orang biasa, semuanya dianggap sama di mata hukum.
5. Hukuman harus diterima pelaku jarimah, hubungan dengan pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh sifat perseorangan, hukuman yang merupakan salah satu prinsip dalam syariat Islam, di mana seseorang yang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan jarimah orang lain, walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau keturunan.

2. Menurut Hukum Pidana Indonesia

Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana pada hukum pidana pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian pertanggungjawaban pidana pada Syariat Islam. Sebelum revolusi Perancis, pengertian pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian sendiri karena setiap orang bagaimanapun keadaannya dibebani pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatannya tanpa membedakan apakah ia berkemauan sendiri atau tidak, sudah dewasa atau belum. Menurut *Van Hammel* sebagaimana yang dikutip oleh

Martiman, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti dan perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu.

Menurut Satochid Kartanegara pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana yang merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Ia juga berpendapat bahwa seorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika:

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu juga akan mengerti akibatnya.
- 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang ia lakukan.
- 3) Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat atau tata susila.

Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang untuk dapat dipidana maka terdakwa haruslah mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbuatan pidana
- 2) Mampu bertanggungjawab
- 3) Dengan sengaja atau alpha
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas bahwa seseorang terdakwa dapat bertanggungjawab apabila terdapat unsur-unsur adanya perbuatan yang melanggar atau melakukan kesalahan baik disengaja maupun kealpaan, dikerjakan dengan kemauan sendiri, mengetahui akibat perbuatannya, mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Jadi dalam hukum pidana positif apabila orang melakukan tindak pidana dan memenuhi kriteria untuk bertanggungjawab di atas. Maka ia akan menerima hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan.

BAB III

Tinjauan Teoritis Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi

A. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut pengertian hukum, dapat dikemukakan sebagaimana yang terdapat dalam UUPLH No 4 tahun 1982. Dalam pasal 1 butir 7 disebutkan sebagai berikut:

“pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”¹

Sedangkan menurut Prof. Munadjat dalam makalah beliau yang berjudul “tentang pencegahan pencemaran laut” yang banyak mendapat tanggapan dari peserta seminar. Adapun pengertian pencemaran yang diberikan oleh guru besar ini ialah sebagai berikut:

“pencemaran adalah suatu keadaan, di mana suatu zat dan/atau energi diintroduksi dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan yang mengakibatkan lingkungan itu

¹ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, cet ke 2 hal 342.

tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.

B. Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan Hidup

Bentuk pencemaran lingkungan hidup diantaranya adalah

1) Pencemaran Udara (Polusi)

Faktor utama penyebab terjadinya pencemaran udara adalah gas beracun, abu, asap, dan partikel yang dikeluarkan dari mesin-mesin industri besar, kendaraan bermotor, serta uap zat-zat kimia yang beracun.

Sumber pencemaran udara umumnya dikelompokkan sebagai berikut : a. sumber titik

b. sumber area dan

c. sumber bergerak

sumber titik dan sumber area biasanya dijadikan satu kelompok sehingga pengelompokan sumber pencemaran tersebut menjadi :²

1. Sumber stasioner. Kelompok sumber stasioner adalah kegiatan yang tempatnya tetap (tidak berpindah), seperti kegiatan rumah tangga, industri, tempat penimbunan sampah, dan letusan gunung berapi
2. Sumber bergerak. Sumber bergerak adalah kegiatan yang sifatnya berpindah tempat dan menimbulkan pencemaran, seperti

² Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Djambatan, 2007, hal 162.

kendaraan bermotor, kapal laut, pesawat terbang, dan angkutan lainnya.³

2) Pencemaran air dan tanah

Pencemaran air dan tanah dapat terjadi akibat limbah industri yang mengandung zat-zat kimia dibuang sembarangan oleh pabrik tanpa memperhatikan kelestarian dan keamanan lingkungan. Akibatnya, limbah industri tersebut mencemari air sungai dan air sumur sehingga mengganggu kesehatan masyarakat setempat yang menimbulkan bermacam-macam penyakit kulit, pernapasan dan mata. Selain disebabkan oleh zat-zat kimia, hal lain yang dapat merusak lingkungan yaitu banyaknya sampah yang dibuang sembarangan sehingga menimbulkan penyumbatan saluran-saluran air yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Pokok perhatian dewasa ini berkisar pada aspek-aspek yang dirasakan sebagai tekanan krisis yang membahayakan kelangsungan hidup manusia. Misalnya kejernihan udara dan sumber air dapat mempengaruhi zat-zat bahan pangan dan produktivitasnya terus-menerus. Semakin banyaknya penduduk yang mendiami suatu tempat, semakin banyak pula sampah yang dibuang ke sungai atau parit sehingga melebihi dayatampung sungai. Akibatnya, fungsi sungai berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Demikian pula, limbah industri banyak yang dibuang ke sungai yang menimbulkan

³ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djambatan, 2007, hal 162.

pencemaran air dan tanah yang mengakibatkan kematian hewan dan menurunnya kesuburan tanah.

3) Pencemaran Suara

Pencemaran suara diakibatkan oleh kegiatan manusia dalam menjalankan mesin-mesin industri dengan suara yang membisingkan sehingga dapat mengganggu pendengaran masyarakat setempat.

C. Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Pencemaran yang dilakukan oleh korporasi diantaranya adalah :

a) Pencemaran Air

Pencemaran air adalah masuknya bahan yang tidak diinginkan kedalam air (oleh kegiatan manusia dan atau secara alami) yang mengakibatkan turunnya kualitas air tersebut sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan “gangguan” secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang mengapung. Bahan pencemar yang masuk ke perairan biasanya merupakan limbah suatu aktivitas.⁴

Menurut sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dibedakan sebagai berikut:

- 1) Limbah domestik (limbah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar, dan pusat perdagangan).

⁴ *Ibid.*

- 2) Limbah industri, pertambangan, dan transportasi.
- 3) Limbah laboratorium dan rumah sakit.
- 4) Limbah pertanian dan peternakan.
- 5) Limbah pariwisata.

Menurut bentuknya, limbah dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan campuran dari limbah tersebut. Selain itu, jenis limbah menurut susunan kimianya terdiri dari limbah organik dan anorganik, sedangkan menurut dampaknya terhadap lingkungan dibedakan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah yang tidak berbahaya atau beracun.⁵

b) Pencemaran tanah

Pencemaran tanah adalah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsure hara menjadi racun bagi tanaman dan biota tanah, dan atau keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu. Pencemaran tanah dapat bersumber dari udara, air hujan, air irigasi, dan banjir.

⁵ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djambatan, 2007, hal 146.

BAB IV

ANALISIS SANKSI PIDANA KORPORASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM KASUS PENCEMARAN

A. Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Korporasi Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup

Sebuah perusahaan pulp and paper terbesar di Asia yang berlokasi di Propinsi Riau PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) melakukan pencemaran sumber air minum warga Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Hal ini terungkap dari keluhan warga atas keruhnya air pada stasiun Pengelolaan Air Minum (PAM) Pelalawan yang dialirkan ke rumah-rumah warga. Sumber air untuk PAM Pelalawan ini berasal dari Sungai Rasau salah satu Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar yang dimanfaatkan warga sebagai air untuk keperluan warga sehari-hari. Atas dasar ini River Defender menuntut PT RAPP untuk segera mencari solusi atas pencemaran tersebut, karena AIR merupakan hajat hidup orang banyak dan bagi siapa saja yang mencemari Sumber Air hukumnya HARAM!!!!

Seperti yang diberitakan Haluan Riau, Pelalawan-Warga Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan meminta PT RAPP membuat kanal baru. Pasalnya, kanal untuk panen akasia salah satu bahan baku pembuatan kertas dan bubur kertas, mengakibatkan air PAM di kelurahan setempat keruh. "Saat ini PT RAPP sedang panen akasia, jadi kanal-kanal yang dipakai perusahaan itu bermuara ke Sungai Rasau, anak Sungai Kampar yang terletak di samping kanan bangunan istana. Sementara sungai itu

dimanfaatkan PAM kelurahan untuk diambil airnya guna keperluan warga. Jadi masalahnya kanal yang saat ini dicuci oleh perusahaan untuk mengangkut kayu, airnya masuk ke Sungai Rasau, sehingga air Sungai Rasau yang tadinya jernih saat ini keruh, sehingga mempengaruhi aliran PAM yang disalurkan ke rumah warga," ujar anggota DPRD asal Pelalawan, T Khairil, Minggu (29/7).

Lebih lanjut dikatakannya, keluhan warga ini dirasakan lebih dari tiga bulan lalu, sehingga warga sekitar saat ini tidak lagi menggunakan air PAM, melainkan langsung menggunakan air Sungai Kampar untuk kebutuhan sehari-hari.

Khairil juga mengatakan, keluhan pencemaran air Sungai Rasau selain datang dari warga yang melaporkan hal ini kepadanya, juga datang dari pengelola PAM setempat. Pengelolah mengeluh sejak adanya pencucian kanal menyebabkan kotornya air Sungai Rasau, pengelolah PAM harus mengeluarkan biaya operasional lebih banyak lagi untuk pembelian bahan kimia guna penjernihan air hingga layak konsumsi.

Warga berharap, PT RAPP menutup kanal mereka yang saat ini terhubung ke Sungai Rasau dan membuat kanal baru. "Sebenarnya masyarakat dan pengelola PAM setempat tidak menuntut apa-apa dari perusahaan. Mereka hanya minta perusahaan membuat kanal baru dan menutup semua kanal pembuangan dari PT RAPP ke Sungai Hulu Bandar dan Sungai Sempaya, Anak Sungai Rasau, karena disamping mengakibatkan pendakalan juga berdampak pengaruh zat asam yang ditimbulkan gambut yang terbawa arus.

Herman, Kepala PAM Pelalawan, ketika dikonfirmasi terkait hal ini, membenarkan hal itu. Dikatakannya, saat ini kondisi Sungai Rasau sangat keruh, sehingga berpengaruh terhadap air PAM yang dialirkan ke rumah warga,

"Ini dirasakan lebih dari tiga bulan, sejak perusahaan mulai memanen, keruhnya air Sungai Rasau sangat berdampak pada kualitas PAM kita, karena untuk kebutuhan air PAM kita mengambil dari Sungai Rasau.

Pencemaran juga terjadi di pulau rangsang. Hingga kini areal permukiman warga, jalan antardesa, dan lokasi kebun masyarakat tergenang air laut akibat pembukaan hutan dan kanal-kanal yang dilakukan perusahaan tersebut. Mahidin menjelaskan, sebelum perusahaan beroperasi, masyarakat di daerah itu telah menolak keberadaan perusahaan tanaman industri itu karena pulau tersebut saat ini mengalami abrasi dan terdiri atas lahan gambut yang dalam.

Dalam tata ruang lingkungan bahwa gambut yang bisa di olah hanya kedalaman 3 cm sedangkan yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut mencapai 6 cm,

Akibat dari pembukaan hutan alam itu, jalan desa, jalan penghubung antardesa, kebun karet, kebun kelapa, kebun coklat, ladang sayur serta permukiman masyarakat di Sungai Gayun terendam banjir dan tidak pernah lagi kering sejak perusahaan membuka areal.¹

¹ *Jikalahari Riau*

B. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam)

Mungkin tidak ada hal yang begitu mengkhawatirkan akhir-akhir ini selain krisis lingkungan. Sebab, kerusakan lingkungan telah menjadi bencana di hampir semua belahan dunia. Begitu pula di Indonesia, lingkungan rusak karena pembangunan ekonomi terlalu mengedepankan target-target pengejaran material dengan tidak memberikan perhatian lebih pada aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan dan hubungannya dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam adalah merupakan hubungan yang memiliki rambu-rambu yang jelas dan dapat di akomodir seperti hukum-hukum yang lain dalam bidang muamalah (kehidupan sosial-masyarakat). Karena, dalam Islam ada banyak konsepsi yang mengatur hubungan antara lingkungan dengan manusia. Banyak ayat yang membahas tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan alam, dan Islam sebagai ajaran jelas-jelas sangat ramah lingkungan dan anti kerusakan. Karena Islam sebagai agama rahmatan lil`alamin juga melarang keras manusia berbuat kerusakan dimuka bumi ini.²

Melalui Kitab Suci Al-Qur'an, Allah telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Informasi tersebut memberikan sinyalamen bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar

² Abdillah, M. 2005. *Fikih Lingkungan*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

bahkan menjadi punah, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah. Melalui Kitab Suci yang Agung ini (Al-Qur'an) membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah lingkungan. Firman Allah SWT Di dalam Al-Qur'an sangat jelas berbicara tentang hal tersebut.³ Sikap ramah lingkungan yang diajarkan oleh agama Islam kepada manusia dapat dirinci sebagai berikut :

1. Agar manusia menjadi pelaku aktif dalam mengolah lingkungan serta melestarikannya

Perhatikan surat Ar Ruum ayat 9 dibawah ini :

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ لَهُمْ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya : Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang

³ Shihab, M. Quraish, 1996. *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan. Bandung.

berlaku zalim kepada diri sendiri. Pesan yang disampaikan dalam surat Ar Ruum ayat 9 di atas menggambarkan agar manusia tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dikhawatirkan terjadinya kerusakan serta kepunahan sumber daya alam, sehingga tidak memberikan sisa sedikitpun untuk generasi mendatang. Untuk itu Islam mewajibkan agar manusia menjadi pelaku aktif dalam mengolah lingkungan serta melestarikannya. Mengolah serta melestarikan lingkungan tercermin secara sederhana dari tempat tinggal (rumah) seorang muslim. Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani : ”*Dari Abu Hurairah : jagalah kebersihan dengan segala usaha yang mampu kamu lakukan. Sesungguhnya Allah menegakkan Islam di atas prinsip kebersihan. Dan tidak akan masuk surga, kecuali orang-orang yang bersih*” . (HR. Thabrani). Dari Hadits di atas memberikan pengertian bahwa manusia tidak boleh kikir untuk membiayai diri dan lingkungan secara wajar untuk menjaga kebersihan agar kesehatan diri dan keluarga/masyarakat kita terpelihara. Demikian pula, mengusahakan penghijauan di sekitar tempat tinggal dengan menanamkan pepohonan yang bermanfaat untuk kepentingan ekonomi dan kesehatan, disamping juga dapat memelihara peredaran suara yang kita hisap agar selalu bersih, bebas dari pencemaran. Dalam sebuah Hadits disebutkan : ”Tiga hal yang menjernihkan pandangan, yaitu menyaksikan pandangan pada yang hijau lagi asri, dan pada air yang mengalir serta pada wajah yang rupawan (HR. Ahmad)

2. Agar manusia tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan

Di dalam surat Ar Ruum ayat 41 Allah SWT memperingatkan bahwa terjadinya kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Telah nampak **kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia**, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Serta surat Al Qashash ayat 77 menjelaskan sebagai berikut :⁴

وَأَبْتَغِ فِيْمَا عَاتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan **janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi**. Sesungguhnya Allah tidak menyukai

⁴ Shihab, M. Quraish, 1996. *Wawasan Al-Qu'an*, Mizan. Bandung

*orang-orang yang berbuat kerusakan.*⁵ Firman Allah SWT di dalam surat Ar Ruum ayat 41 dan surat Al Qashash ayat 77 menekankan agar manusia berlaku ramah terhadap lingkungan (*environmental friendly*) dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi pernah bersabda :”*Hatilah terhadap dua macam kutukan; sahabat yang mendengar bertanya : Apakah dua hal itu ya Rasulullah ? Nabi menjawab : yaitu orang yang membuang hajat ditengah jalan atau di tempat orang yang berteduh*” Di dalam Hadits lainnya ditambah dengan *membuang hajat di tempat sumber air*. Dari keterangan di atas, jelaslah aturan-aturan agama Islam yang menganjurkan untuk menjaga kebersihan dan lingkungan. Semua larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar tidak mencelakakan orang lain, sehingga terhindar dari musibah yang menimpahnya. Islam memberikan panduan yang cukup jelas bahwa sumber daya alam merupakan daya dukung bagi kehidupan manusia, sebab fakta spritual menunjukkan bahwa terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, serta bencana alam lainnya lebih banyak didominasi oleh aktifitas manusia. Allah SWT Telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, secara yuridis fiqhiyah berpeluang dinyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam status hukum pelestarian lingkungan hukumnya adalah wajib (Abdillah, 2005 : 11-12).

3. Agar manusia selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungan

⁵ *Ibid*

Di dalam Surat Huud ayat 117, Allah SWT berfirman :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

*Artinya : Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.*⁶

Fakta spritual yang terjadi selama ini membuktikan bahwa Surat Huud ayat 117 benar-benar terbukti. Perhatikan bencana alam banjir di Jakarta, tanah longsor yang di daerah-daerah di Jawa Tengah, intrusi air laut, tumpukan sampah dimana-mana, polusi udara yang tidak terkendali, serta bencana alam di daerah atau di negara lain membuktikan bahwa Allah akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, melainkan penduduknya terdiri dari orang-orang yang berbuat kebaikan terhadap lingkungan. Dalam suatu kisah diriwayatkan, ada seorang penghuni surga. Ketika ditanyakan kepadanya perbuatan apakah yang dilakukannya ketika di dunia hingga ia menjadi penghuni surga?. Dia menjawab bahwa selagi di dunia, ia pernah menanam sebuah pohon. Dengan sabar dan tulus, pohon itu dipeliharanya hingga tumbuh subur dan besar. Menyadari akan keadaannya yang miskin ia teringat bunyi sebuah hadits Nabi, “Tidak seorang muslim yang menanam tanaman atau menyemaikan tumbuh-tumbuhan, kemudian buah atau hasilnya dimakan manusia atau burung, melainkan yang demikian itu adalah shodaqoh baginya”. Didorong keinginan untuk bersedekah, maka ia biarkan orang berteduh di bawahnya, dan diikhlasakannya manusia dan burung memakan buahnya. Sampai ia meninggal pohon itu masih berdiri hingga

⁶ *Ibid*

setiap orang (musafir) yang lewat dapat istirahat berteduh dan memetik buahnya untuk dimakan atau sebagai bekal perjalanan. Burung pun ikut menikmatinya. Riwayat tersebut memberikan nilai yang sangat berharga sebagai bahan kontemplasi, artinya dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan memberikan dua pahala sekaligus, yakni pahala surga dunia berupa hidup bahagia dan sejahtera dalam lingkungan yang bersih, indah dan hijau, dan pahala surga akhirat kelak di kemudian hari. Untuk mendapatkan dua pahala tersebut seorang manusia harus peduli terhadap lingkungan, apalagi manusia telah diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Hal ini dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 30 berikut :

..... إِنْى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

Kekhalifahan menuntut manusia untuk memelihara, membimbing dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaanNya. Karena itu, Nabi Muhammad SAW melarang memetik buah sebelum siap untuk dimanfaatkan, memetik kembang sebelum mekar, atau menyembelih binatang yang terlalu kecil. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar selalu bersikap bersahabat dengan segala sesuatu sekalipun tidak bernyawa. Al-Qu'an tidak mengenal istilah "penaklukan alam" karena secara tegas Al-Qur'an menyatakan bahwa yang menaklukan alam untuk manusia adalah Allah. Secara tegas pula seorang muslim diajarkan untuk mengakui bahwa ia tidak mempunyai kekuasaan untuk

menundukkan sesuatu kecuali dengan penundukan Allah (Shihab, 1996 : 492-493).

Secara ekologis pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan ekologis yang tidak dapat ditawar oleh siapapun dan kapanpun. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan tidak boleh tidak harus dilakukan oleh manusia. Sedangkan secara spiritual fiqhiyah Islamiyah Allah SWT memiliki kepedulian ekologis yang paripurna. Paling tidak dua pendekatan ini memberikan keseimbangan pola pikir bahwa lingkungan yang baik berupa sumber daya alam yang melimpah yang diberikan Allah SWT kepada manusia tidak akan lestari dan pulih (*recovery*) apabila tidak ada campur tangan manusia. Hal ini diingatkan oleh Allah dalam Surat Ar Ra'd ayat 11 :

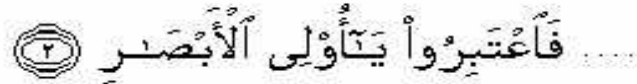
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*⁷

Umat Islam selalu berkeyakinan untuk tidak terperosok pada kesalahan yang kedua kalinya. Kejadian yang sangat dasyat yang kita alami akhir-akhir ini, sebut saja bencana alam Tsunami misalnya, pencemaran udara, pencemaran air dan tanah, serta sikap rakus pengusaha dengan menebang habis hutan tropis melalui aktifitas illegal logging, serta sederet bentuk

⁷ Shihab, M. Quraish, 1996. *Wawasan Al-Qu'an*, Mizan. Bandung.

kerusakan lingkungan hidup lainnya, haruslah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Hal ini ditegaskan oleh dalam firmanNya di dalam surat Al-Hasyr ayat 2 :



"Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan" ⁸

Bersikaplah menjadi pelaku aktif dalam mengolah lingkungan serta melestarikannya, tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan, dan selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungan. Dari hasil analisa penulis ketahui bahwa dalam hukum Islam perbuatan perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang sangat di larang hukumnya. Sedang kalau dilihat dari akibat dan dampak negatif yang ditimbulkan dari perusakan lingkungan maka dalil yang digunakan dalam menentukan hukum adalah dengan Syadz al-dzari'ah Dan perbuatan perusakan lingkungan dalam hukum Islam dapat diancam dengan sanksi berupa ta'zir, yang bentuk dan macam sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau penguasa sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan .

C. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Hukum Pidana Indonesia

Tanggung jawab pidana yang dimaksud disini ialah proses yang dilalui seseorang atau badan usaha sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan itu dapat berupa kesengajaan (opzet) maupun kealpaan (culpa).

⁸ Ibid.

A. UUPH Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup

Pasal 41 ayat 1 dan 2:

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42 ayat 1 dan 2

- (1) barang siapa dengan kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seeratus juta rupiah).
- (2) jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).⁹

Pasal 43 ayat 1 ayat 2 dan 3

- (1) barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau ke dalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, menangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya kaitannya dengan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran

^{9 9} Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, cet ke 2 hal 415.

dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

- (3) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).¹⁰

Pasal 44 ayat 1 dan 2

- (1) barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan,

¹⁰ Taufik Makarao mohammad, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, 2006, hal 2

perserikatan, yayasan atau organisasi lain, anacam pidana denda diperberat dengan sepertiga.¹¹

Pasal 46

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 dijatuhkan baik pada badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- (2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang member perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana sendiri atau bersama-sama.

¹¹ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, cet ke 2 hal 415-416.

- (3) jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan tetap.
- (4) jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penutupan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Konsekuensi penerapan ketentuan tentang tanggung jawab korporasi ini benar-benar harus dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana penjara, disamping perusahaannya dikenakan denda, karna telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya itu.¹²

B. UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pada bab XIV ketentuan pidana pasal 78 mengatakan:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 50 ayat 1 atau pasal 50 ayat 2 (merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan atau pengusaha hutan melakukan kegiatan yang merusak hutan), diancam dengan pidana

¹² Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet ke 19, hal 436.

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagai mana di maksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf a, huruf b, atau huruf c (menguasai hutan secara tidak sah, merambah dan menebang hutan dengan jarak 500 meter dari tepi waduk atau danau, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf d (membakar hutan), diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1, 2, dan ayat 3 apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap penngurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- 5) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan

kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.¹³

C. Analisis

Dalam upaya sadar kita mengetahui bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Tetapi kita melihat kebelakangan ini banyak musibah telah melanda kehidupan masyarakat, meningkatna kasus demam berdarah, beberapa daerah mengalami banjir, tanah longsor dan baru-baru ini terjadinya kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap. Ini semua akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri, sesuai dengan firman ALLAH di dalam surah ar-rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Di ayat ini ALLAH menekankan agar manusia berlaku ramah terhadap lingkungan dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini.

sebenarnya Suatu kejahatan tidak akan begitu saja terjadi, apabila tidak ada penyebabnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan

¹³ Taufik Makarao mohammad, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, 2006, hal 260

yang mempunyai akal, pikiran dan perasaan tidak akan melakukan perbuatan jahat, apabila tidak ada pengaruh dari faktor-faktor tertentu yang membuat ia melakukan demikian. W. A Bonger menyebutkan kejahatan sebagai : "Perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).¹⁴

Pencemaran lingkungan hidup ini dalam praktiknya tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja, akan tetapi sudah merambah kepada praktek "kongkalikong" dan konspirasi untuk melakukan suatu tindakan yang hanya menguntungkan kelompok sendiri akan tetapi mengakibatkan pencemaran lingkungan sebagai dampak dari tindak pidana korporasi yang dilakukan. Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan bahkan secara terang-terangan dipertontonkan kepada rakyat oleh kalangan elit yang dalam hal ini, pengusaha, oknum pemerintah, cukong-cukong, seolah-olah negeri ini adalah monopoli milik mereka. Patut diakui, dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup, Indonesia agak terlambat dalam merespon hal tersebut. Dari hasil analisa penulis ketahui bahwa dalam hukum Islam perbuatan perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang sangat di larang hukumnya. Sedang kalau dilihat dari akibat dan dampak negatif yang ditimbulkan dari perusakan lingkungan maka dalil yang digunakan dalam menentukan hukum adalah dengan Syadz al-dzari'ah Dan perbuatan perusakan lingkungan dalam hukum Islam

¹⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.

dapat diancam dengan sanksi berupa ta'zir, yang bentuk dan macam sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pada dasarnya kita mengetahui bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan. Hingga menyebabkan terjadinya perubahan yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.
2. Berbagai macam bentuk pencemaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang mempunyai badan hukum yang sah, seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Sepertinya negeri ini monopoli milik mereka. patut diakui, dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup, indonesia agak terlambat merespon hal tersebut.
3. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamini juga melarang keras manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini. Melalui Kitab Suci Al-Qur'an, Allah telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Seperti yang di informasikan dalam surat ar-rum ayat 9 dan 41 di bawah ini:

وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا
 وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ يَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿٤١﴾

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim pada diri sendiri.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
 الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٢﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dari ayat di atas ini jelas menegaskan agar manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi dan melestarikan kesejahteraan lingkungan.

4. Dari UUPH Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup dan UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. jelas menegaskan bahwa sanksi yang harus di berikan pada pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan sesuai dengan tindak pidana yang berlaku dan akibat dari perbuatan tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah lebih focus memperhatikan masalah lingkungan hidup agar masyarakat lebih nyaman tinggal di negeri ini.
2. Kemudian hal yang sangat diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan yang mendasar, baik kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pada aparat penegak hukum sehingga pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat diminta spertanggungjawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Al-audah, *Al-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami*, (Beirut Al-Fikri).
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Kuwait: Dar Al-Bayan, 1977), Cet.ke-6
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998).
- Bonger, A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-6
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),
- Dwijodarmo Moeljadi, *Istilah-istilah Hukum Dalam Bahasa Belanda*, (Jakarta: PT Karya Nusantara, 1983), Cet. Ke-3
- Hanafi Ahmad, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), Cet. Ke-6
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Hanafi Ahmad, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1997).
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Prees), Cet. Ke-19
- Karden Eddy Sontang Malik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Pancuran Alam, 2008), Cet. Ke-2

- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- Subagya Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990)
- Syahrudin Husein, Ratna Asih, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan: FH USU, 1997).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan 1996).
- Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), Cet. Ke-2
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Taufik Makarao Muhammad, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (PT Indeks, 2006).
- Tim Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, *Buku Panduan Akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: 2011).
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Yafie Ali, *Menggagas Fiqh Sosial, Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhwah*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. Ke-3